



**PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD KABUPATEN NGADA
TERHADAP
NOTA KEUANGAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA
TAHUN ANGGARAN 2024**

- ❖ Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
- ❖ Salam Sejahtera bagi kita semua,
- ❖ Om Swastiastu, Namo Budaya,
- ❖ Salam Kebajikan.
- ❖ **Yth. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada,**
- ❖ **Yth. Bapak Bupati dan Wakil Bupati Ngada beserta seluruh jajaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngada,**
- ❖ **Serta hadirin yang berbahagia.**
- ❖ Salam Indonesia Raya!!!

Pada tempat yang pertama, marilah kita menyampaikan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan pemeliharaan serta perlindunganNya terhadap kita sekalian, sehingga dapat hadir dan melaksanakan rapat paripurna ini.

Hadirin sidang Dewan yang terhormat,

Sekalipun terlambat kurang lebih 6 bulan dari jadwal yang ditentukan, Fraksi Partai Gerindra menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas penyampaian nota keuangan atas Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapata daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024 ini. Fraksi memandang perlu penyampain laporan tersebut, selain sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD juga sebagai dasar untuk evaluasi penyelenggaraan Permerintah Daerah Kabupaten Ngada selama Tahun Anggaran 2024 terutama menyangkut realisasi program dan kegiatan yang berpedoman kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang meliputi **arah kebijakan umum Pemerintah Daerah** dengan fokus pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan daya saing Ekonomi, dan **pengelolaan Keuangan Daerah secara makro (pendapatan dan belanja daerah)**, yang berpedoman pada prinsip efesiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Fraksi Partai Gerindra memahami bahwa, konteks pembahasan Nota Keuangan tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD Kepala Daerah Tahun 2024 ini, tidak untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap muatan materinya, namun dalam rangka evaluasi antara rencana, realisasi dan laporan dengan kenyataan sesuai dengan norma-norma yang ada.

Untuk itu, Fraksi Partai Gerindra akan menyampaikan beberapa catatan dan evaluasi terhadap Nota Keuangan tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD Kabupaten Ngada Tahun 2024:

I PENDAPATAN DAERAH

A. Pendapatan Asli Daerah(PAD)

Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp.50.519.508.005,00 terealisasi sebesar Rp 45.701.023.657,24 atau 90,46% atau selisih kurang dari yang ditetapkan sebesar

Rp 4.818.484.347,76 dengan rincian pendapatan asli daerah terdini dari:

- a. Pajak Daerah ditetapkan sebesar Rp 10.297.500.000,00 terealisasi sebesar Rp 10.663.409.255,00 atau 103,55%;
- b. Retribusi Daerah ditetapkan sebesar Rp 10.422.268.005,00 terealisasi sebesar Rp 4.848.846.432,58 atau 46,52% kurang dari yang ditetapkan sebesar Rp 5.573.421.572,42;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp 2.400.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 1.132.734.946,00 atau 47,93% kurang dari yang ditetapkan sebesar Rp 1.267.265.054,00;
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ditetapkan sebesar Rp 27.399.740.000,00 terealisasi sebesar Rp 29.056.033.023,66 atau 106,04%;

Dari uraian mengenai sumber penerimaan untuk PAD Ngada 2024 ini, **Restribusi Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah** sumbangsih untuk PAD kecil,

realisasinya tidak mencapai 50% dari target yang ditetapkan. Apakah ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi masyarakat rendah sebagaimana disampaikan pemerintah? Menurut Fraksi Partai Gerindra, ada kemungkinan lain yakni penetapan target yang terlalu tinggi tanpa memperhitungkan mana saja objek retribusi yang jadi sumber PAD dan kinerja yang belum maksimal dalam memungut retribusi dan mengelolah kekayaan daerah. Maka, Untuk meningkatkan PAD di tahun-tahun berikutnya, Pemerintah Daerah harus dapat memaksimalkan kinerjanya, mendata dan mengklasifikasikan secara riil objek retribusi serta mengembangkan potensi-potensi baru yang bisa menambah PAD, menarik retribusi dan mengelolah kekayaan daerah secara maksimal.

Oleh karena itu perlu penetapan yang realistis untuk tahun anggaran berikutnya karena potensi terbesar dengan perubahan nomen katur pajak Propinsi dari kendaraan bermotor berubah menjadi opsen pajak yang menjadi kewenangan Kabupaten.

B. Pendapatan Transfer ditetapkan sebesar Rp 1.010.376.912.305,00 terealisasi sebesar Rp 1.008.016.183.534,00 atau 99,77% dengan rincian

1. Pendapatan transfer pusat terdiri dari bagi hasil pajak (DBH) dan dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) dianggarkan sebesar Rp.835.711.986.000,00 terelaisi sebesar Rp 825.955.699.025,00 atau setara dengan 98,83%. Fraksi Partai Gerindra menyampaikan ucapan terimakasih atas transfer dan pemrintah pusat tersebut.
2. Pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya yang terdiri dari pendaptan dana desa dan dana insentif daerah dianggarkan sebesar Rp 159.155.337.000,00 terealisasi sebesar Rp 156.288.007.000,00 atau 98,20%
3. Transfer Pemerintah Daerah lainnya, berupa pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi ditetapkan sebesar Rp 25.772.477.509,00 atau 166,17%. Kelebihan realisasi atas target penerimaan dari Pemerintah Daerah lainnya merupakan pelunasan piutang pajak tahun sebelumnya dari pemerintah daerah provinsi.
Partai Fraksi Gerindra sangat memahami realisasi penerimaan pendapatan transfer daerah untuk tiga komponen tersebut di atas namun perlu dikaji sisa anggaran transfer yang tidak direalisasikan.

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, berupa pengembalian dana hibah KONI dan pendapatan dana kapitasi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama(FKTP) ditetapkan sebesar Rp 7.478.456.652,00 terealisasi sebesar Rp 7.329.530.367,27 atau 98,01%.

Fraksi Partai Gerindra melihat realisasi komponen Pendapatan Daerah yang terkecil adalah dari Pendapatan Asli Daerah, jika dibandingkan dengan komponen transfer lainnya dimana komponen Pendapatan Asli Daerahnya mencapai 4,31% dari total Pendapatan Daerah, yang menunjukkan ketergantungan tinggi (95 % dari dana transfer pusat). Dari target retribusi daerah yang ditetapkan terealisasi sebesar 46,52% dari target dan menurun dari tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan kinerja yang tidak efisien terhadap terobosan pemungutan PAD. Belum ada terobosan kebijakan signifikan dalam menggali potensi PAD padahal PERDA pajak retribusi yang baru ditetapkan pada tahun 2024 yakni pajak No.1 tentang pajak retribusi daerah. Capaian realisasi komponen Pendapatan Daerah secara keseluruhan, Fraksi Partai Gerindra memandang telah maksimal pencapaiannya, namun khusus penerimaan Pendapatan Asli Daerah perlu ditingkatkan untuk waktu yang akan datang. Sesuai dengan Nota Keuangan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Ngada tahun anggaran 2024 tentang keterbatasan Pendapatan Daerah yakni pendapatan sumber asli daerah, Fraksi Partai Gerindra memandang perlu menyampaikan kepada pemerintah untuk secara aktif menggali potensi-potensi daerah yang belum ditetapkan. Permasalahan manajemen daerah dalam rangka peningkatan PAD sangat diharapkan untuk semua komponen penerimaan daerah dikaji secara riil untuk meningkatkan penerimaan PAD di waktu yang akan datang.

II. BELANJA DAERAH

Belanja daerah untuk Tahun 2024 terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Fraksi Partai Gerindra ingin menyoroti beberapa hal sebagai berikut

- 1. Belanja operasi** yang dianggarkan sebesar Rp 642.036.670.441,00 terealisasi sebesar Rp 604.339.338.396,55 untuk membiayai komponen Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang secara keseluruhan komponen Belanja Operasi lebih besar dari komponen Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga serta Belanja Transfer.

Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi belanja operasional tersebut. Namun, Fraksi ingin mendapatkan gambaran yang lengkap perihal Belanja Operasi terutama pada poin Belanja Bantuan Sosial yang realisasinya sebesar Rp1.775.100.000,00 atau 87,44 % dari total anggaran sebesar Rp2.030.000.000,00; Kalau bantuan sosial ini adalah upaya untuk mensejahterahkan masyarakat, Fraksi Partai Grindra menyayangkan realisasinya yang tidak mencapai target. Oleh

karena itu, Fraksi meminta penjelasan seperti apakah klasifikasinya: apakah bantuan ini adalah bantuan pemberdayaan, ataukah bantuan darurat ataukah bantuan konsumtif sesewaktu?

2. Belanja Modal, Fraksi Partai Gerindra ingin menyoroti perihal belanja modal.

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp.246.329.070.637,00 realisasi sebesar

Rp 205.394.092.085,65 atau 83.38% yang terdiri dari :

- a. Belanja Modal Tanah dianggarkan sebesar Rp.493.108.808,00 realisasi 100%;
- b. Belanja Modal Peralatan Mesin dianggarkan sebesar Rp 41.721.394.821,00 realisasi Rp.39.198.394.139,00 atau 93.95%;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp.128.952.236.846,00 realisasi sebesar Rp96.477.260.834,62 atau 74,82%;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi dianggarkan sebesar Rp 64.894.341.512,00 realisasi sebesar Rp 61.518.024.587,03 atau 94.80%;
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp6.868.020.350,00 realisasi sebesar Rp 4.887.309.780,00 atau 71.16%;
- f. Belanja Modal Aset Lainnya dianggarkan sebesar Rp3.399.968.300,00 realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp 2.819.993.950,00 atau sebesar 82.94%.

Berdasarkan prinsip: **Alokasi Belanja dilakukan menurut skala prioritas dengan mengutamakan kepentingan atau kebutuhan masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah**, Fraksi Partai Gerindra melihat bahwa di APBD Tahun Anggaran 2024 belanja modal yang teralokasi untuk belanja jalan, jaringan dan irigasi terlalu rendah dan ini berarti prioritas untuk belanja modal belum berpihak kepada masyarakat banyak. Fraksi meminta tanggapan pemerintah atas skala prioritas alokasi belanja modal ini. Fraksi sangat menaruh harapan untuk tahun 2025, skala prioritas belanja modal harus lebih besar untuk infrastruktur jalan, jaringan dan irigasi.

- 3. Belanja tak terduga**, dianggarkan sebesar Rp 6.581.781.972,00 realisasinya sebesar Rp 3.489.734.000,00. Fraksi Partai Gerindra mempertanyakan mengapa terealisasi hanya mencapai 53,02%
- 4. Komponen Belanja Transfer** yang terealisasi sebesar Rp202.276.083.242,00 dari anggaran sebesar Rp 207.386.986.448,00 yang terdiri atas belanja bagi hasil dan belanja

bantuan keuangan, Fraksi Partai Gerindra menerima capaian tersebut karena merupakan sumber belanja dana transfer ke daerah

III PEMBIAYAAN DAERAH

Uraian tentang pembiayaan netto sebesar Rp 34.199.246.656,15 dari yang dianggarkan sebesar Rp 33.959.562.537,00 atau melampaui target sebesar 100,71 %. Penerimaan pembiayaan terealisasi sebesar Rp 80.247.025.989,19 dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dianggarkan Rp 80.257.341.870,00 yang terealisasi sebesar 100%. Komponen pengeluaran pembiayaan adalah penyertaan modal sebesar RP 3.797.779.333,00 dan terealisasi 100%.

Pembayaran pokok pinjaman Rp 42.500.000.000,00 terealisasi 100%. Fraksi Partai Gerindra mencermati pembiayaan APBD tahun anggaran 2024 dapat dipahami, namun Fraksi Partai Gerindra mempertanyakan kembali penggunaan pinjaman daerah sebesar Rp 42.500.000.000,00 untuk belanja apa saja karena pembayaran pokok utang kepada Bank NTT telah dilaksanakan. Fraksi Gerindra meminta penjelasan tentang efisiensi penggunaan dana pinjaman (outcome based) tersebut.

Dari komponen APBD yang dituangkan dalam nota keuangan tahun anggaran 2024 tergambar sebagai berikut :

1. Realisasi pendapatan Rp 1.061.046.737.558,51
2. Realisasi belanja daerah Rp 1.015.499.256.724,20
- Surplus/(Defisit) Rp 45.547.480.834,31
3. Realisasi pembiayaan :
 - a. penerimaan Rp 80.247.025.989,19
pembiayaan
 - b. pengeluaran Rp 46. 047.779.333,04
pembiayaan
- pembiayaan netto _____ Rp 34.199.246.656,15

Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun ini Rp 79.746.727.490,46

Dari sisa lebih perhitungn anggaran (SiLPA) TAHUN 2024 sebesar Rp79.746.727.490,46 , Fraksi Partai Gerindra mohon penjelasan secara detail dari pemerintah tentang komponen SiLPA tersebut, apakah SiLPA ini real atau SiLPA semu yang harus diuraikan secara jelas karena sepengetahuan Fraksi masih ada piutang-

piutang di tahun 2024 yang belum terbayarkan dan pencatatan atas laporan keuangan yang tergambarkan atas catatan laporan keuangan (CALK).

SiLPA Tahun anggaran 2024 sebesar Rp79,7 Miliar lebih Turun dari Rp 80,2 Miliar lebih di tahun anggaran 2023, hal ini menunjukkan Penurunan SiLPA merupakan tren positif jika terjadi karena efisiensi dan akurasi belanja, namun Fraksi belum melihat laporan yang menjelaskan peruntukan SiLPA secara rinci, berkaitan dengan tindak lanjut temuan BPK telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi capaian WTP, namun opini WTP tidak otomatis berarti tanpa masalah. Belum dijelaskan secara spesifik temuan-temuan BPK yang perlu ditindaklanjuti dan progres realisasi Rencana Aksi 60 hari.

Fraksi menilai bahwa Pemerintah Daerah telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024 secara substantif, namun masih terdapat catatan penting terkait:

- Rendahnya kemandirian fiskal daerah akibat komposisi PAD yang belum optimal;
- Minimnya realisasi sektor retribusi dan lemahnya pemungutan terhadap potensi pajak lokal;
- Kelemahan dalam pengelolaan belanja modal dan pelaksanaan kegiatan konstruksi yang masih mengalami penundaan dan serapan tidak maksimal;
- Kurangnya laporan mendalam atas tindak lanjut temuan BPK;
- Keterlambatan penyampaian nota keuangan yang secara hukum bertentangan dengan ketentuan Pasal 320 UU 23/2014.

Oleh karena itu, kami mendorong agar dokumen pertanggungjawaban ini menjadi momentum refleksi dan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola keuangan daerah demi mewujudkan Tata Pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada hasil yang dirasakan masyarakat.

Hadirin Sidang Dewan yang terhormat,

Sebelum mengakhiri Pemandangan umum Fraksi ini, secara keseluruhan Fraksi Partai Gerindra dengan memohon berkat Tuhan Yang Maha Kuasa menyatakan MENERIMA NOTA KEUANGAN tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada 2024 untuk dibahas dalam masa sidang ini.

Demikianlah pandangan umum dari Fraksi Partai Gerindra yang disampaikan pada masa sidang ini dan atas perhatian disampaikan ucapan terima kasih.

Bajawa, 11 Juli 2025

FRAKSI PARTAI GERINDRA

KETUA : WILHELMUS PETRUS BATE, SH

WAKIL KETUA : ATANASIUS YOS LENGU

SEKRETARIS : KAROLUS BARTOLOMEUS MAKU

ANGGOTA :

RUDOLF AQROZ WOGO, S.Pi

MARTINUS TOIYO